

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik sering kali dipandang sebagai organisasi yang dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta, sehingga kedudukannya dianggap lebih rendah dan tertinggal jauh dibandingkan dengan sektor swasta. Ketidakefisienan dan lambatnya perkembangan organisasi disebabkan oleh manajemen organisasi pada kebanyakan organisasi sektor publik masih lemah, dan bahkan dianggap tidak penting. Hal ini bisa jadi dikarenakan organisasi sektor publik merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu, sehingga kemajuan dan perkembangan organisasi tergantung kesadaran dan perhatian masyarakat tersebut terhadap manajemen organisasi termasuk praktik akuntansinya. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi peribadatan (tempat ibadah).

Selama ini, tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, sembahyang, berdoa, menyembah, berdzikir, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya tempat ibadah apabila disadari sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya. Mungkin

hal ini sekilas dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada dan terkesan membesar-besarkan (hiperbola). Namun, sebenarnya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas (*center of activity*) dari masyarakat sesuai dengan agama masing-masing. Pusat aktivitas ini meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Jika hal ini mampu dijalankan oleh tempat ibadah, maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh yaitu kesejahteraan lahir (fisik) dan kesejahteraan batin (emosional dan spiritual). Inilah yang membedakan dengan organisasi publik lainnya. Oleh karena itu, tempat ibadah harus disadari dan dimaknai sebagai sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan adalah akuntansi.

Organisasi keagamaan juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomis dan biaya sosial, serta dampak positif dan negatif dari aktifitas yang dilakukannya (Bastian, 2007). Semestinya, berbagai tuntutan tersebut dapat menyebabkan akuntansi diterima dengan cepat dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan. Namun, kenyataannya yang ada kebanyakan pengelola dan pengurus organisasi keagamaan belum menyadari pentingnya menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). salah satu usaha usaha untuk menciptakan tata kelola yang baik adalah dengan menciptakan akuntabilitas yang baik dengan menyelenggarakan praktik akuntansi. Akuntansi pada organisasi keagamaan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, dalam bentuk lengkap maupun sederhana.

Mesjid merupakan organisasi nirlaba. Oleh karena itu, dalam laporan keuangannya menggunakan PSAK 45. Karakteristik organisasi nirlaba atau dalam hal ini, organisasi sektor publik, berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai

aktivitas operasionalnya. Organisasi sektor publik memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan para penyumbang lainnya.

Pengawasan pengelolaan mesjid dilakukan oleh takmir mesjid. Takmir mesjid mengelola mesjid menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dalam hal fasilitas mesjid yaitu peralatan yang dibutuhkan mesjid secara rutin, aktivitas apa saja yang harus dilaksanakan, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya mesjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam penerapan akuntansi mesjid, mesjid menggunakan basis kas yaitu mengakui biaya dan pendapatan pada saat pembayaran, dan mesjid tidak perlu membuat jurnal cukup dengan pembukuan yang dicatat dengan tunggal (*single entry method*). Mudahnya akuntansi dalam mesjid kerap menjadi peluang bagi masyarakat terutama pengelola mesjid yang tidak amanah, masalah ini kerap menjadi masalah yang sering muncul dan sulit dihilangkan karena mudahnya sistem akuntansi di mesjid.

Dalam organisasi mesjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola mesjid (Ayub:1996). Jika pengelolaan keuangan mesjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus mesjid orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kepercayaan semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi.

Pada tahun 2014 telah terjadi penyalahgunaan dana hibah. Anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan mesjid agung Kabupaten Bandung Barat dipertanyakan. Terlebih setelah proses pembangunannya terhenti pada November tahun lalu, karena

kontraktor (PT Gunakarya Nusantara) tidak sanggup menyelesaikannya sesuai dengan jadwal. Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, Ade Ratmadja mengatakan tahap pembangunan yang baru terealisasi pada saat ini hanya fondasi dasar dan tiang pancangnya saja. Dia mengestimasi, biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk fondasi dan tiang pancangnya itu sekitar satu miliar atau malah dibawahnya. Sedangkan dana hibah yang telah dikeluarkan untuk pembangunan itu adalah 7,5 miliar. Sekarang, kemana dana yang telah dikeluarkan itu? Jangan sampai menjadi tidak jelas.”ujarnya Kamis (9/1/2014). Dia mengatakan, dirinya juga pernah bergelut di bidang konstruksi. Berkaca dari pengalaman yang telah ditempuhnya, dia beranggapan, fondasi dan tiang pancang yang saat ini ada, nominalnya jauh dari nominal dana hibah sebesar Rp7,5 miliar. Oleh sebab itu pula, Ade Wiratmadja mempertanyakan penggunaan dana hibah setelah pembangunan mesjid terhenti. Menurutnya, Pemkab perlu menyampaikan secara jelas dana hibah yang telah diserahkan kepada panitia pelaksana pembangunan Masjid Agung KBB. Terlebih setelah proses pembangunannya tidak terealisasi seratus persen, karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan tepat jadwal. Direktur Investigasi dan Advokasi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, audit BPK semester 1 tahun 2013 menemukan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD KBB dengan nilai total sebesar Rp110,5 miliar. Jumlah tersebut akumulasi dari 144 kasus yang ditemukan. Menurutnya, dugaan terjadinya penyelewengan anggaran mayoritas terjadi di tiga pos anggaran, yakni bantuan sosial, dana hibah, dan pos bantuan keuangan di sejumlah SKPD. Uchok mengatakan, dana hibah dari Pemkab untuk panitia pembangunan Masjid Agung KBB menjadi salah satu temuan dari audit BPK tersebut. Menurut dia, kenapa bisa disebut dugaan penyimpangan anggaran karena belum ada bentuk laporan pertanggungjawabannya. Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra mengatakan, anggaran yang telah dihibahkan oleh Pemkab saat ini berada di kas panitia pelaksana pembangunan Masjid Agung. Dia menjamin,

dana hibah tersebut aman berada di kas panitia pelaksana. “sementara untuk SPJ, saat ini kami sedang mengejar terus. Tidak hanya dalam hal pembangunan mesjid, namun juga di pos-pos lainnya. Kami menargetkan Februari dapat selesai semuanya, sesuai dengan target kami untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,”katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Pembangunan Mesjid Agung, Zaenal Mustopha mengatakan, dana hibah dari pemkab saat ini masih ada di Bank Jabar dengan rekening berdasarkan milik panitia pelaksana. Dia menuturkan, saat masih dalam proses pembangunan, baru mengeluarkan sebanyak Rp2,3 miliar dari 7,5 miliar. “untuk uang yang sudah dikeluarkan, pada intinya kami masih menunggu proses perhitungan. Apakah uang yang sudah dikeluarkan kepada kontraktor sudah pas, atau sebaliknya,”kata dia. Zaenal menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan penghitungan terhadap pembangunan yang sudah diselesaikan oleh kontraktor. Penghitungan itu dilakukan dengan menyewa konsultan independen dari ITB. Dia mengestimasi penghitungan ini bisa selesai pada Februari tahun ini, termasuk penalti karena kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pembangunan dengan tepat jadwal. “kami juga ingin secepatnya menyelesaikan perhitungan ini. Soalnya, kami ingin segera memulai lagi pembangunan mesjid,”ujarnya.

Sumber: www.pikiran-rakyat.com/node/265527, 27 Maret 2014, 19.31 WIB

Dalam penelitian yang penulis ambil yaitu pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan masjid. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen keuangan masjid adalah pengendalian internal dan amanah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsari (2011) dengan judul Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Dalam penelitian Dahnil Anzar Simanjuntak Dan Yeni Januarsari (2011) lebih memfokuskan praktik akuntansi dalam bentuk laporan keuangan sebagai suatu wujud

transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Masjid. Dalam penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian bukan hanya didasarkan pada praktik akuntansi, tetapi peneliti akan mengkaji atas pertanggungjawaban secara keseluruhan atas segala aktifitas dan kinerja finansial organisasi masjid. Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Masjid Raya Baitusalam Kabupaten Tangerang. sedangkan obyek penelitian yang penulis ambil adalah 16 mesjid-mesjid yang ada di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Manajemen Keuangan mesjid”**.

1.2 Identifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan pada mesjid di Kota Bandung.
2. Bagaimana transparansi laporan keuangan pada mesjid di Kota Bandung.
3. Bagaimana manajemen keuangan mesjid di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan mesjid di Kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas laporan keuangan pada mesjid di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi laporan keuangan pada mesjid di Kota Bandung

3. Untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan pada mesjid di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan pada mesjid di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi penulis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, antara lain :

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan mesjid. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Untuk memperoleh masukan tentang informasi mengenai kualifikasi sarjana yang dibutuhkan di dunia kerja dalam rangka peningkatan mutu lulusannya, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan. Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

c. Bagi Organisasi

Bagi organisasi nirlaba, lebih khususnya organisasi pengelolaan keuangan mesjid, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktik akuntansi pada lembaga mesjid terutama dalam hal manajemen keuangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Mesjid di Kota Bandung. Penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti waktu yang diambil adalah bulan Mei 2014.